

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik memerlukan suatu penguatan kelembagaan atau institusionalisasi dalam jangka panjang. Pelembagaan yang dimaksud adalah proses menjadikan organisasi dan prosedur organisasi memperoleh nilai baku dan stabil. Setidaknya pelembagaan partai dapat diukur dari tingkat otonomi dan kesisteman. Tingkat otonomi terkait sejauh mana partai tidak tergantung pada kekuatan lingkungannya. Tingkat kesisteman terkait dengan sejauh mana saling ketergantungan diantara sub-sektor partai. Perubahan yang terjadi dalam organisasi dan prosedur organisasi partai dapat memengaruhi – setidaknya – pada tingkat kesisteman partai. Sehingga, tidak jarang memunculkan konflik internal partai atau mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan partai.

Penelitian ini akan membahas mengenai perubahan pola mekanisme suksesi kepemimpinan pada Partai Amanat Nasional. Perubahan pola mekanisme kepemimpinan menjadi suatu topik penting untuk dibahas karena kepemimpinan merupakan posisi sentral dalam suatu organisasi. Selain itu, dengan program pelatihan kadernya yang diarahkan untuk memahami realitas dan praktek politik, partai menjadi lumbung orang-orang yang terbiasa dengan teori-teori politik dan demokrasi, sehingga dengan adanya perubahan pola mekanisme suksesi kepemimpinan dapat menjadi bahan evaluasi tentang bagaimana pemahaman demokrasi dari perspektif kader partai khususnya Partai Amanat Nasional.

Selain dua hal diatas, alasan tema perubahan pola mekanisme suksesi kepemimpinan menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah untuk mencari

jawaban sejauh mana seluruh unsur partai dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan dan kesesuaian antara nilai dan kultur dengan perubahan yang terjadi. Karena adaptabilitas, nilai dan kultur merupakan indikator – selain otonomi dan kesisteman – untuk menilai sejauh mana partai politik terlembagakan.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada Partai Amanat Nasional wilayah Sulawesi Selatan. Selain untuk mempermudah proses penelitian, pemilihan ketua umum DPW PAN Sulawesi Selatan sempat menjadi sorotan publik karena terjadi keributan dan mendapat penolakan dari sejumlah pengurus DPD PAN se-Sulsel. Hal tersebut disebabkan proses pemilihan ketua umum DPW PAN Sulsel dianggap tidak adil karena tidak ada musyawarah dan pemilihan secara langsung untuk memberikan hak suara kepada para pengurus DPD. Proses pemilihan ketua umum DPW PAN Sulsel melalui mekanisme penunjukan Formatur oleh DPP PAN sebagai calon ketua PAN DPW Sulsel. Seperti yang di beritakan oleh beberapa media Sulawesi Selatan

“Sembilan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan 48 Ketua Pengurus Ranting (DPRT) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palopo mengundurkan diri sebagai kader dan sepakat menyatakan sikap untuk mengundurkan diri dikarenakan kecewa terhadap keputusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Sulawesi Selatan yang telah memutuskan Abduh Bakry Pabe sebagai Ketua DPD PAN Kota Palopo yang baru. Kader PAN Palopo mengatakan apabila formatur yang telah ditunjuk Deadlock atau tidak menemukan jalan keluar untuk menentukan ketua DPD PAN seharusnya diberikan kepada ketua DPC sebagai pemilik hak suara untuk memilih ketua yang baru.”¹

“Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang sempat ribut, kini deadlock. Setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN yang mengumumkan 4 nama formatur tanpa melalui pemilihan langsung yakni Ashabul Kahfi,

¹Hamdan Soeharto. (2016). Tolak Bakry, 9 Ketua DPC dan 48 DPRT keluar dari PAN. Di akses dari koran<http://makassar.tribunnews.com/2016/10/13/tolak-bakry-9-ketua-dpc-dan-48-dprt-keluar-dari-pan> tanggal 19 oktober 2016 jam 16.22 WIB

Jamaluddin Jafar, Dodi Amiruddin, dan Najamuddin Najib, Kini mendapat penolakan dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-Sulsel.”²

Partai Amanat Nasional di Wilayah Sulawesi Selatan memiliki kekuatan politik di Parlemen atau DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sulawesi Selatan yang cukup signifikan. Berdasarkan Dokumen Daftar Anggota legislatif PAN terbukti dengan jumlah kader PAN yang mendapatkan jabatan strategis sebagai Pimpinan DPRD Provinsi maupun di Kabupaten Kota. Di DPRD Provinsi PAN Berhasil mendapatkan 9 (Sembilan) kursi dan berada diperingkat 4 (empat) dalam perolehan kursi legislatif dengan memperoleh 414.389 suara atau 9,23 persen meningkat di banding Pemilu Legislatif 2009 yang memperoleh 293.782 suara. Dan di Kabupaten Kota PAN memiliki 1 (Satu) Ketua DPRD dan 7 (Tujuh) Wakil Ketua DPRD. Untuk perolehan suara PAN dan Kursi di seluruh daerah Sulawesi – Selatan juga mengalami peningkatan sehingga pada saat ini PAN mempunyai 81 anggota DPRD Kabupaten/Kota dan menempatkan kader-kader untuk menempati posisi sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD di beberapa Kabupaten/Kota³.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul Perubahan Pola Mekanisme Suksesi Kepemimpinan Partai Amanat Nasional, dengan memfokuskan pada faktor dan dampak dari perubahan mekanisme suksesi kepemimpinan tersebut. Dengan mengetahui faktor dan dampak perubahan, penelitian dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemahaman demokrasi dari perspektif kader partai, lebih khusus lagi penelitian ini akan

²Pansaringi al. (2016). Muswil pan sulsel deadlock (sejumlah ketua dpd pan se-sulsel melakukan perlawanan terhadap putusan DPP pan. Diakses dari koran pojoksulsel tanggal 2 oktober 2016

membandingkan pemahaman tersebut dari masing-masing kader PAN mulai dari lapisan atas dan lapisan bawah partai.

Penulis tertarik untuk meneliti tentang Partai Amanat Nasional di Sulawesi Selatan dikarenakan Partai ini merupakan salah satu partai yang memiliki 9 kursi Legislatif. Partai Amanat Nasional juga memiliki basis massa yang ril dikarenakan adanya hubungan erat dengan ormas muhammadiyah di daerah tersebut. Selain itu adanya keterlibatan generasi muda pada posisi strategis di kepengurusan Partai Amanat Nasional di Sulawesi Selatan dan yang terakhir adanya fenomena baru dalam tubuh Partai ini berupa kepemimpinan 3 periode Ashabul Kahfi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah PAN Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor faktor apa yang menjadi pertimbangan perubahan pola suksesi kepemimpinan di DPW PAN Sulawesi Selatan tahun 2015?
- b. Apa dampak yang muncul dari perubahan pola suksesi kepemimpinan di DPW Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Mengetahui bagaimana faktor-faktor terjadinya perubahan pola suksesi kepemimpinan Partai Amanat Nasional di Sulawesi Selatan.
- b. Mengetahui bagaimana dampak perubahan pola suksesi kepemimpinan dalam partai amanat nasional terutama dalam proses suksesi internal partai di Sulawesi-Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Teoritis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan para kader Partai PAN mengenai Suksesi Kepemimpinan di Partai Politik.
- b. Pratis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan cara pandang baru bagaimana praktik Suksei Kepemimpinan oleh kelompok partai politik yang merupakan pilar demokrasi yang sangat penting.

E. Literatur Review

Penelitian pertama Tesis Muhammad Imam Akbar Hairi (2012) tentang Demokrasi Internal Partai, Proses Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Golkar. Penelitian ini menjadi menarik karena sebelum reformasi pemilihan ketua umum partai Golkar dilakukan secara tertutup atau tidak demokratis. Penelitian tersebut lebih menekankan pada Golkar Era

Reformasi dengan melihat proses pemilihan ketua umum Golkar pada saat munas hingga faktor-faktor yang mempengaruhi seorang calon ketua umum yang baru.

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa terpilihnya akbar Tandjung pada Munaslub 1998 disebabkan figurinya sebagai politisi sipil yang telah lama berkisah di dalam Golkar serta tekanan reformasi yang anti-militer dan anti soeharto, dukungan Ormas HMI, dukungan pengusaha kaya dan juga posisinya sebagai Mensesneg. Terpilihnya Jusuf Kalla pada munas 2004 disebabkan pengaruh kekuasaan sebagai Wapres 2004-2009 dan latar belakang sosial sebagai seorang pengusaha kaya. Sedangkan terpilihnya Aburizal Bakries pada munas 2009 disebabkan pengaruh kekuasaan sebagai Menteri Ekonomi Kesejahteraan Rakyat Kabinet SBY jilid I, serta posisinya sebagai orang terkaya Asia Tenggara tahun 2008 versi majalah Globe Asia.⁴

Penelitian Kedua dilihat dari Skripsi Wengky Saputra (2012). Tentang pola Rekrutmen Partai Politik (Studi : Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat dalam menetapkan Caleg pada pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Agam). Partai politik mempunyai posisi dan peranan sangat penting dalam sistem demokrasi. Setiap partai politik memiliki sistem rekrutmen yang berbeda, dimana pola rekrutmen anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya.

Dalam Skripsi Wengky (2012) sistem rekrutmen memiliki beberapa indikator yaitu : pertama, penyediaan rekrutmen politik terhadap caleg, DPC Partai Demokrat menyediakan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mencalonkan diri, kedua kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/kriteria

⁴ Lihat Tesis Akbar, imam 2012. *Demokrasi internal partai, proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional Golkar*. Hlm 1

Caleg oleh oleh Partai Demokrat dilihat melalui pendidikan minimal S1 dan memiliki Popularitas yang tinggi.⁵

Penelitian ketiga dari Jurnal Christian Huwae tentang peran Partai politik dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Studi : Kota Bitung). Kekuasaan partai politik sangat kuat untuk menentukan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dan memiliki peran yang sangat penting dalam jalannya pemilihan kepala daerah. Partai politik berhak melakukan proses penjurangan bakal calon dan melakukan rekrutmen, Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 59 ayat (1), bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Melihat peran partai politik khususnya di Kota Bitung dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung, peran partai politik sebagai mesin bagi tegaknya demokrasi, beberapa parpol belum mampu berperan secara maksimal dalam menegakkan demokratisasi ditingkat lokal dan belum bisa meredam *Money Politic* di kota Bitung.⁶

Penelitian keempat dari Skripsi Darus Eko Saputro tentang Demokratisasi Partai Politik (Studi Kasus Regenerasi Kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Kehidupan partai politik dalam teori dan praktik perlu memperlihatkan kecenderungan yang lebih demokratis untuk mendukung

⁵ Lihat Skripsi Saputra, wengky 2012. *Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi : Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat dalam Menetapkan Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Agam)*. Hlm 21

⁶ Lihat Jurnal Huwae Christian 2011, *tentang Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala*

kesuksesan demokratis. Proses demokratis yang dijalankan oleh partai politik adalah bukti bahwa partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi benar benar menjalankan hakekatnya untuk menciptakan iklim politik dan pemerintahan yang demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Skripsi Daurus dapat dilihat bahwa proses demokrasi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih memertahankan pertimbangan pribadi dan keterkaitan pada tradisi, dimana setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan restu Megawati selaku ketua umum. Megawati memegang peranan sebagai penentu keputusan akhir, yang artinya Megawati sebagai ketua umum dijadikan sebagai titik sentral di PDIP.⁷

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu tentang Mekanisme Perubahan Suksesi Kepemimpinan Partai Politik

NO	Nama	Judul	Metode	Temuan Masalah
1	Imam Akbar Hairi (2012)	Proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Golkar.	Metode Kualitatif	Terpilihnya Akbar Tandjung pada Munaslub 1998 disebabkan figurnya sebagai politisi sipil yang telah lama berkorporasi di dalam Golkar serta tekanan reformasi yang anti-militer dan anti soeharto serta posisinya sebagai Mensesneg. Jusuf Kalla terpilih pada munas 2004 disebabkan pengaruh kekuasaan sebagai Wapres 2004-2009. Sedangkan terpilihnya Aburizal Bakrie pada Munas 2009 disebabkan pengaruh kekuasaan dan memiliki posisi strategis sebagai

⁷Lihat Skripsi Eko Daurus 2013, *tentang Demokrasi Partai Politik* (Studi kasus : Regenerasi Kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Hlm 3

				Menteri Ekonomi.
2	Wengky Saputra (2012)	Pola Rekrutmen Partai Politik	Metode Deskriptif Kualitatif	Dalam proses Rekrutmen Partai politik, Demokrat memiliki Kriteria yang dilihat melalui Pendidikan Minimal S1 dan memiliki Popularitas yang tinggi.
3	Christian Huwae (2011)	Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung	Metode Kualitatif	Partai Politik memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan pemilihan kepala secara langsung, karena partai politik diberikan hak penuh untuk menentukan salah satu calon kepala daerah untuk diusung.
4	Darus Eko Putra (2013)	Demokratisasi Partai Politik	Metode Kualitatif	Demokrasi belum sepenuhnya terjadi di partai PDIP yang dimana segala keputusan harus berdasarkan ketua umum, dan pengulangan pemilihan ketua umum di PDIP tidak menghasilkan regenerasi atau pertukaran pemimpin. Hal ini menandakan bahwacara kerja demokrasi terhadap pengulangan pemilihan tidak hadir secara subsantif tetapi ganya dihadirkan secara struktural/prosedural.

Dalam Penelitian terdahulu peneliti dapat mempelajari berbagai metode dan permasalahan yang dihadapi dalam sistem pemilihan dan rekrutmen partai politik. Penelitian yang telah dilakukan hampir sama dengan yang dilakukan oleh peneliti yang sekarang tentang Partai Politik akan tetapi berbeda dalam hal studi

Melihat dari kajian yang sudah ada sebelumnya, maka peneliti akan mengambil penelitian tentang Mekanisme perubahan suksesi kepemimpinan Partai Politik di Sulawesi-Selatan. Melihat dari mekanisme pemilihan ketua partai politik yang berbeda-beda maka peneliti mencoba melakukan penelitian di internal Partai Amanat Nasional (PAN).

Hal menarik dalam penelitian ini dan menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengambil tema tentang perubahan pola suksesi dalam partai politik. Dari sebelumnya pola suksesi yang digunakan adalah pemilihan langsung berubah menjadi pemilihan tidak langsung dengan pemilihan formatur. Penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor perubahan dan dampak yang timbulkan pasca perubahan pola suksesi kepemimpinan terjadi. Penelitian ini berusaha untuk menarik kesimpulan bagaimana pemahaman demokrasi dari para kader-kader partai politik khususnya Partai Amanat Nasional DPW Sulawesi Selatan.

F. Kerangka Dasar Teori

Dalam kajian pustaka ini peneliti akan menggunakan tiga teori yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana mekanisme pemilihan kepemimpinan yang dapat dipahami, dipraktikan, dan dinegosiasikan antara *elite* yang berkuasa yaitu

1. Teori Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Adapun beberapa ilmuwan mendefinisikan partai politik sebagai berikut:

a. Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.

b. Sigmund Neumann

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

c. Giovanni Sartori

Partai politik adalah suatu kelompok yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

d. Miriam Budiarjo

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara Konstitusional untuk melaksanakan programnya.⁸

e. Ramlan Surbakti

Partai politik adalah sebuah organisasi yang memerlukan anggota dalam menjalankan setiap program program yang disusun berdasarkan ideologi partainya, bertujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan.

f. Sigit Pamungkas

Partai politik adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan, dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertannya dalam pemilihan umum.⁹

1.1 Fungsi Partai Politik

Menurut Ramlan Surbakti Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Berikut ini sejumlah fungsi partai politik:

⁸ Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama) hlm. 403

⁹ Pamungkas Sigit. *Partai Politik. Teori dan Praktek di Indonesia*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Institut

a. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

b. Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya

c. Partisipasi Politik

Politik ialah kegiatan yang warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

d. Komunikasi Politik

Komunikasi Politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada

e. Pengendali Konflik

Konflik yang timbul dalam sistem politik melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.

f. Kontrol Politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.¹⁰

1.2 Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian menurut Maurice Deverger dalam bukunya *Political Parties*, dan demikian juga G. A. Jacobsen dan M.H. Lipman dalam buku *Political Science* tentang sistem partai, mengklasifikasikan sistem kepartaian dalam tiga macam sistem, yakni:

a. Sistem Partai – Tunggal (*One Party System*)

Biasanya diakui bahwa negara – negara dengan sistem partai tunggal, partai kenyataanya merupakan alat pemerintah daripada perhimpunan suka rela dari para pemilih. Sistem partai tunggal meliputi Negara yang benar-benar hanya mempunyai satu partai disamping itu juga Negara dimana ada satu partai yang dominan. Dalam negara yang menganut sistem partai tunggal, keadaan kepartaian dalam Negara tersebut

¹⁰ Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu politik*, Jakarta: PT.Grasindo, Hal 116-121.

tidak bersaing atau Non kompetitif, hal ini disebabkan karena partai-partai yang ada dalam negara harus menerima pimpinan dari partai yang dominan serta tidak dibenarkan untuk bersaing secara bebas terbuka.

b. Sistem Dwi-Partai (*Two Parti System*)

Didalam negara yang menganut sistem dua partai atau lebih maka yang memegang peranan dominan hanya dua partai saja. Dalam sistem dua partai maka dapat dibagi menjadi dua partai, yaitu partai besar yang berkuasa, karena dapat menang dalam pemilihan umum dinamakan partai mayoritas (majority party), partai ini memegang tanggung jawab untuk urusan-urusan umum. Sedangkan partai yang lainnya dinamakan minoritas (minority party) atau partai oposisi (oposisi party) karena kalah dalam pemilihan umum. Partai oposisi mempunyai tugas memeriksa dengan teliti dan mengkritik pemerintah.

c. Sistem Multi Partai (*Multi Party System*)

Dalam Negara yang menganut sistem multi partai membuat iklim demokratisasi kembali menyeruak. Hal ini dikarenakan sistem multi partai dapat merepresentasikan wakil-wakil yang diinginkan oleh masyarakat. Efek yang muncul dari sistem ini adalah terdapatnya beberapa partai yang sama imbang kekuatannya. Dan masing-masing mempertahankan visinya

dalam mengatasi sejumlah persoalan tertentu yang dianggap dapat meraih simpati masyarakat.¹¹

1.3 Tipologi Partai Politik

Dalam konsep masyarakat dewasa ini mengenai partai politik ialah sebuah organisasi yang hanya bertujuan meraih kekuasaan, dan bercengkrama tegur sapa dengan masyarakat hanya menjelang pemilu, setelah itu menghilang. Hal ini mungkin dikarenakan praktek yang dirasakan masyarakat dalam setiap momen pemilihan umum dan sesuai apa yang mereka lihat dan rasakan.

Secara teoritik dapat dipahami bahwa setiap partai politik memiliki tipologi masing – masing berdasarkan beberapa hal. Ramlan Surbakti mendefinisikan tipologi partai politik ialah pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggotanya. Di bawah ini diuraikan sejumlah tipologi partai politik menurut kriteria – kriteria tersebut, sebagai berikut :

a. Azas dan Orientasi

Berdasarkan azas dan orientasinya, partai politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe. Adapun ketiga tipe ini meliputi partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan. Pertama, yang dimaksud Partai politik pragmatis ialah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya perubahan waktu, situasi, dan

¹¹ Maurice Duverger, G. A. Jacobson dan M. H. Lipman, 1984. dalam Sulistiati Ismail Gani, Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta: Gala Indonesia, Hlm 114-115

kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan, dan penampilan partai politik tersebut. penampilan partai politik pragmatis cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun oleh pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang pemimpin. Partai ini terorganisir agak longgar. Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat merupakan contoh partai pragmatis. Kedua, yang dimaksud dengan partai doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkret sebagai penjabaran ideologi. Ideologi yang dimaksud ialah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara kongkrit dan sistematis dalam bentuk program - program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Pergantian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara kongkret dan partai ini terorganisasikan secara ketat. Partai komunis dimana saja merupakan contoh partai doktriner. Ketiga, yang dimaksud dengan partai kepentingan ialah suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Partai ini sering ditemui dalam sistem banyak partai tetapi kadangkala terdapat pula dalam sistem dua partai berkompetisi namun tak mampu mengakomodasikan sejumlah kepentingan dalam masyarakat. Misalnya, Partai Hijau di Jerman, Partai Buruh di Australia, dan Partai Petani di Swiss.

b. Komposisi dan Fungsi Anggota

Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa ialah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dengan mudah dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Partai ini seringkali merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat untuk berada dalam lindungan partai guna memperjuangkan dan melaksanakan program - program yang pada umumnya bersifat sangat umum. Partai kader adalah suatu partai politik yang mengandalkan kualitas anggotanya, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur organisasi partai ini sangat hirarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. Karena sifatnya yang demikian partai kader acap kali disebut partai yang sangat elitis. Contoh partai kader ini terdapat pada Nazi di Jerman dan Partai Komunis dimanapun.¹²

¹²Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu politik, Jakarta: PT.Grasindo, 1992, Hal 120-123

1.4 Pelambagaan Partai Politik

Pelembagaan partai dalam aspek pengelolaan organisasi internal partai merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan partai meraih suara dalam pemilu. Seperti yang dikemukakan oleh Firmanzah (2008), bahwa peran partai secara institusional sebagai pusat yang mengendalikan kemenangan dalam pemilu itu sendiri. Aspek organisasi partai politik merupakan entitas yang penting untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan pada sebuah pemerintahan. Keberhasilan sebuah partai politik terletak bagaimana mekanisme internal partai tersebut.¹³ Kemampuan partai politik dalam mencapai fungsi dan tujuannya merupakan integrasi dari struktur organisasi, perilaku aktor dan kelompok dalam organisasi, serta proses di dalam partai politik tersebut. Apabila internal partai bermasalah, maka sangat kecil kemungkinan harapan partai untuk dapat mencapai fungsi dan tujuannya secara optimal.

Pencapaian sebuah partai politik merupakan kesinambungan dari struktur dan mekanisme dalam tubuh partai itu sendiri. Untuk menjamin kemampuan dalam mencapai fungsi dan tujuannya, organisasi partai politik harus dikelola dengan tepat. Aspek pengelolaan internal partai politik akan menentukan kuat atau lemahnya sebuah partai. Pengelolaan internal partai politik yang dilaksanakan dengan tepat akan mampu menghasilkan sebuah partai yang kuat secara struktural. Dengan memiliki struktur pelembagaan yang kuat maka partai akan memiliki basis massa yang kuat dan besar .

¹³Miriam Budiarto, 2006, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman

Pelebagaan partai menurut menurut Vicky Randall dan Lars Svasand adalah proses pematapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya (the process by which the party become established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitude and culture)¹⁴. Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural.

Apabila kedua aspek ini dipersilangkan maka akan dihasilkan sebuah table empat sel, yaitu (1) derajat kesisteman (systemnes) sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural. (2) derajat identitas nilai (value infusion) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural. (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dan struktural. (4) derajat pengetahuan atau citra publik (reification) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan kultural.

Terdapat dua dimensi yaitu internal dan eksternal serta terdapat dua elemen yaitu elemen structural dan sikap/cultural (budaya) pada pelembagaan partai. Dimensi internal menjelaskan mengenai hubungan antar bagian dalam tubuh partai, yang dimana pada bagian ini berimplikasi pada peningkatan kontinuitas dan prospek terhadap akuntabilitas pemilu. Dimensi eksternal menjelaskan bahwa partai dalam melembagakan dirinya tidak hanya membentuk bagian dirinya internal saja melainkan perlu membentuk hubungan diluar partai

¹⁴Vicky Randall dan Lars Svasand. "Party Institutionalization In New Democracies". jurnal Party

dalam hal ini hubungan antara partai dengan pemerintahan atau bahkan dengan organisasi selaras lainnya.

Sebagaimana yang diukir dari komposisi dari beberapa dimensi pelebagaan partai diatas, terdapat empat (4) aspek yang menentukan bagaimana sebuah partai politik dapat dilihat dan dianalisis drajat pelebagaan partai politiknya dengan melakukan penaksiran (assessment) terhadap tingkat pelebagaan yang telah berlangsung dalam suatu partai politik :

Pertama, Dimensi kesisteman.yang dimaksudkan dengan kesisteman yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yang dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh partai politik dalam Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) secara komprehensif. Kesisteman ini meliputi ruang lingkup, keanggotaan dan keberlangsungan interaksi yang membentuk partai menjadi sebuah struktur.¹⁵

Kedua, Dimensi identitas nilai. Identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai poilitik berdasarkan ideologi atau platform partai, dan karena itu berdasarkan basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. Karena itu derajat identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan (a) hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (popular bases), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung oleh kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, kalangan masyarakat tertentu, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan (b) pengaruh klientelisme

¹⁵ Randal dan Syasand, Op. Cit. halaman 17-21

dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumental (anggota selalu mengharapkan tangible resources berupa materi dari partai) atautkah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai). Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas.

Ketiga, Dimensi otonomi. Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar) dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat): (a) apakah partai tergantung kepada aktor luar tersebut atautkah hubungan itu bersifat saling tergantung (interdependen), dan (b) apakah keputusan partai ditentukan oleh aktor luar atautkah hubungan itu berupa jaringan (linkage) yang memberi dukungan kepada partai.

Keempat, Dimensi reifikasi. Reifikasi menunjukkan Derajat pengetahuan publik tentang partai politik yang merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik. Bila keberadaan partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik, maka pihak lain baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan ataupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut. Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai tersebut.

2. Suksesi dan Legitimasi Kepemimpinan

Karena legitimasi dan suksesi mempunyai hubungan sangat dekat maka konsep penting persoalan kepemimpinan adalah persoalan legitimasi atau keabsahan sehingga menarik untuk melihat apakah sebuah proses dan formasi kepemimpinan itu mendapatkan legitimasi atau delegitimasi oleh orang-orang yang terlibat dan terikat di dalamnya. Mekanisme demokrasi akhir-akhir ini menjadi alat ukur bagaimana sebuah kekuasaan itu absah (legal-formal).

Secara umum alasan utama mengapa legitimasi menjadi penting bagi pemimpin pemerintahan.¹⁶ Pertama, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dari kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial. Pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pihak yang berwenang akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat umum. Pemerintah yang memiliki legitimasi akan lebih mudah mengatasi permasalahan daripada pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi.

Adanya pengakuan seseorang terhadap keunggulan orang lain pada hakekatnya menunjukkan adanya keabsahan atas keunggulan yang dimiliki pihak yang disebut belakangan. Pengakuan tersebut murni diperlukan karena tanpa adanya pengakuan tersebut, maka keunggulan yang dimiliki seseorang tidak mempunyai makna apapun. Menurut Gaetano Mosca, pengakuan terhadap keberadaan elit yang dapat dinyatakan sebagai suatu legitimasi ini diistilahkan

sebagai suatu 'political formula' yang maksudnya adalah terdapatnya suatu keyakinan yang menunjukkan mengapa 'the rullers' dipatuhi kepemimpinannya.¹⁷

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Max Weber menyatakan pendapatnya bahwa terdapat tiga macam 'legitimate domination' yang menunjukkan dalam kondisi seperti apa sehingga seseorang atau sekelompok orang mampu mendominasi sejumlah besar orang lainnya.¹⁸ Ketiga macam legitimasi kekuasaan tersebut adalah: (a) legitimasi tradisional, (b) kekuasaan charismatik, dan (c) kekuasaan legal-rational.

a. kekuasaan tradisional

Dominasi ini mendasarkan pada tradisi yang ada dan berlaku di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian legitimasi yang diperoleh elit tentu saja didasarkan pada tradisi yang ada dan berlaku. Dalam dominasi tradisional dapat diketemukan massa dengan kepercayaan yang mapan terhadap kesucian tradisi yang ada. Sehingga pada gilirannya individu-individu yang terpilih sebagai pemimpin yang berkuasa bukan dilihat dari kharisma atau kemampuan yang dimilikinya, tetapi semata-mata atas dasar kesepakatan bersama anggota-anggota masyarakat yang sudah mentradisi.

Dalam dominasi tradisional ini hubungan yang terjadi antara elit dan massa tidak jarang merupakan sebuah hubungan yang lebih bernuansa personal. Kesempatan massa untuk direkrut sebagai staf administrasi dilihat berdasarkan pada pertimbangan loyalitas pribadi bukan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa massa mempunyai kesetiaan yang tinggi

¹⁷Mark N. Hagopian, *Regimes, Movements and Ideologies*, dalam Haryanto, *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*. (Yogyakarta : Fisipol Universitas Gadjah Mada, 2005), hal.145

¹⁸Max Weber, *Legitimate Domination*, dalam Haryanto, *Ibid.*, hal.145-146

terhadap penguasa, dan sebaliknya penguasa juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan massa. Akan tetapi walaupun terdapat ikatan yang sangat kuat antara massa dan elit penguasa, masih saja terdapat keleluasaan bagi penguasa secara pribadi mempergunakan otoritasnya sesuai dengan kehendaknya.

b. kekuasaan kharismatik

Merupakan dominasi yang didasarkan pada kharisma yang melekat pada diri seseorang. Perihal kharisma, Weber memberi pengertian sebagai "suatu sifat tertentu dari suatu kepribadian seorang individu berdasarkan mana orang itu dianggap luar biasa dan diperlakukan sebagai seseorang yang mempunyai sifat unggul atau paling sedikit dengan kekuatan-kekuatan yang khas dan luar biasa". Elit atau penguasa yang kemunculannya didasarkan pada kharisma yang dimiliki, pada umumnya akan berupaya menunjukkan bukti tentang keelitannya dengan cara menunjukkan kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh orang awam, pada umumnya merupakan hal-hal yang bersifat ajaib. Semakin mampu seorang individu menunjukkan bukti-bukti yang hebat dan relatif langka, maka akan semakin tinggi pula legitimasi yang akan diperolehnya sebagai elit yang berkuasa.

c. kekuasaan Legal-Rational

Dominasi ini pada hakekatnya didasarkan pada kesepakatan anggota masyarakat terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi. Individu yang berperan sebagai elit di masyarakat yang memberlakukan dominasi tipe ini diakui keberadaannya atas kemampuan yang dimilikinya dan persyaratan menurut peraturan yang berlaku. Demikian pula dengan seleksi bagi individu-individu yang dapat menduduki posisi elit ini juga diatur secara tegas

oleh peraturan yang secara resmi berlaku. Persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk menduduki posisi tertentu belum tentu sama dengan posisi lain yang dibutuhkan, karena semakin tinggi posisi yang dituju, persyaratan yang harus dipenuhi juga semakin tinggi pula begitu pula dengan kemampuan yang dimiliki juga harus semakin besar. Sebagai akibat dari kesepakatan-kesepakatan tersebut, maka individu-individu yang tidak memiliki kemampuan akan sulit untuk dapat menduduki posisi tertentu sebagai elit. Hanya individu-individu yang mempunyai kemampuan dan dipandang telah memenuhi persyaratan yang bisa mendapatkan legitimasi.

Tipe-tipe legitimasi sebagaimana dipaparkan diatas, pada tataran realita masyarakat biasanya tidak berjalan sendiri-sendiri, artinya dimungkinkan lebih dari satu tipe legitimasi diterapkan di suatu masyarakat. Menurut Charles Andrain terdapat lima obyek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tetap berlangsung dan fungsional, yaitu:¹⁹ masyarakat (komunitas) politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik, dan kebijakan.

Konsep kedua adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah dimensi yang harus ada dalam kelompok sosial manusia. Untuk dapat melanjutkan kehidupan suatu kelompok, pergantian kepemimpinan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Suksesi kepemimpinan atau pergantian kepemimpinan adalah hal yang mutlak dalam sebuah organisasi.

Istilah suksesi dapat diartikan sebagai pergantian. Suksesi kepemimpinan adalah pergantian atau peralihan pada tingkat kepemimpinan suatu organisasi.

¹⁹Charles Andrain, *Political Life and Social Change : An Introduction to Political Science*, (California : Wadworth Publishing Company Inc. 1970), hal.213-216

Suksesi kepemimpinan merupakan hal yang natural dan merupakan bentuk dari dinamika kepemimpinan. Titik kritis dalam suksesi kepemimpinan ini adalah bagaimana mendapatkan calon pemimpin yang sadar akan posisinya sebagai pemimpin yang memiliki makna bahwa *pemimpin itu melayani*.²⁰

Suksesi kepemimpinan bukanlah sekedar perebutan kekuasaan. Langkah dan sikap bijak diperlukan dengan tujuan membentuk organisasi kearah yang lebih baik.²¹

2.1 Pola Suksesi Kepemimpinan

Biasanya Pola Suksesi Kepemimpinan Partai Politik yang dilaksanakan dan diterapkan oleh masing-masing partai berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tetapi terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah maka mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai²².

Terkait siapa kandidat yang dinominasikan dalam model inklusif adalah setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Sementara untuk model eksklusif terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat.

²⁰Ragil Sapto Wibowo, *Suksesi Kepemimpinan dalam Pandangan Partai Keadilan Sejahtera*, 2011, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal 13

²¹Ibid, hal 14

²²Harvanto. *Sistem Politik, Suatu Pengantar*, 1982, Yogyakarta :Liberty

Tabel 1.1 Nominasi Kandidat

Anggota Partai	Model
Semua Kader Partai	Inklusif
Petinggi Partai	Eksklusif

Memahami seleksi kandidat, bagaimana kandidat dinominasikan, Rahat dan Hazan dalam buku Sigit Pamungkas²³ menyebutkan dua model yang konfrontatif, yaitu pertama model pemilihan dan model penunjukan. Dalam system pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantaranya penyeleksi. Pada system pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemungutan suara pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara dalam system penunjukan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan. Dalam system penunjukan murni, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai..

Tabel 1.2 Penetapan Kandidat

Metode	Model
Demokratis	Pemilihan
Otoriter	Penunjukan

²³Sigit, Pamungkas, Partai Politik, Teori dan Praktek di Indonesia, 2012, Yogyakarta : Institute For

Konsep seleksi calon di atas merupakan konsep yang dilaksanakan oleh partai politik. Maka relevansinya dalam konteks kajian permasalahan yang akan diteliti adalah peneliti ingin menggunakan konsep seleksi ini untuk mengkaji dan menelaah kandidasi Partai yang dilakukan PAN.

2.2 Mekanisme suksesi Kepemimpinan

Proses penentuan kepemimpinan menjadi hal yang penting disamping pentingnya kepemimpinan didalam kehidupan manusia. Hal ini dimaksudkan untuk berlanjutnya kepemimpinan sebagai penerus kepemimpinan seterusnya. Proses penentuan kepemimpinan disebut juga dengan regenerasi kepemimpinan. Proses ini bertujuan untuk mempertahankan kelompok sesuai dengan arah tujuan perjuangan. Regenerasi sering di artikan sebagai proses yang alamiah, atau suatu keniscayaan, dan sesuatu yang imperatif. Hal ini berarti secara biologis selalu akan muncul generasi baru, yaitu orang-orang muda yang tumbuh menjadi dewasa. Akan tetapi sesungguhnya pengertian tentang generasi bukan sekedar mengacu pada proses biologis..

Proses regenerasi kepemimpinan politik berlangsung di dalam satu tatanan politik yang jelas. Tatanan ini membutuhkan kontinuitas institusional. Namun kontinuitas ini mengandung pengertian terjadinya pergeseran/penggantin pada tingkat personal, karena itu regenerasi kepemimpinan dapat berfungsi sebagai pemeliharaan system dan sebagai saluran bagi terjadinya perubahan

Ciri – cirri mekanisme suksesi kepemimpinan yang demokratis di dalam partai politik adalah sebagai berikut:

1. Setiap pemilih dapat menjadi kandidat. Artinya, seluruh anggota atau kader partai dapat mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin, dengan catatan memenuhi syarat-syarat, kriteria dan memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam hal ini diperlukan model pengelolaan partai dengan pola inklusif yaitu pola yang tidak membatasi hak-hak anggota.
2. Pemimpin terpilih dipilih melalui pemilihan yang objektif dan terbuka, dan berdasarkan hasil suara terbanyak, bukan melalui penunjukan.
3. Ada konstitusi yang membatasi kekuasaan, seperti periodsasi masa jabatan kepemimpinan, sehingga dapat membatasi kekuasaan dengan maksud untuk menghindari perolehan kekuasaan secara terus-menerus, sehingga dapat member kesempatan kepada kader-kader potensial untuk menjadi pemimpin

2.3 Dampak suksesi kepemimpinan

Dampak menurut KBBI memiliki arti benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negative maupun positif, benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga ,menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum (pusa) system yang mengalami benturan itu²⁴. Sedangkan dalam politik dampak memiliki arti akibat suatu keputusan, tindakan, ataupun peristiwa terhadap pendapat umum atau sikap masyarakat²⁵. Sehingga dapat dimengerti bahwa dampak adalah suatu akibat baik positif maupun negatif dari suatu keputusan, tindakan atau peristiwa yang dilakukan oleh individu, masyarakat

Di atas telah disebutkan bahwa dampak memiliki akibat positif dan negative yaitu:

1. Dampak Positif, yaitu dampak yang mengakibatkan suatu kebaikan bagi individu, masyarakat maupun organisasi dikarenakan adanya suatu hal yang telah dilakukan.
2. Dampak Negatif, yaitu dampak yang mengakibatkan suatu keburukan bagi individu, masyarakat maupun organisasi dikarenakan adanya suatu hal yang telah dilakukan.

G. Definisi Konseptual

a. Suksesi Kepemimpinan

Suksesi kepemimpinan adalah pergantian atau peralihan pada tingkat kepemimpinan suatu organisasi. Suksesi kepemimpinan merupakan hal yang natural dan merupakan bentuk dari dinamika kepemimpinan.

b. Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi nilai dan cita-cita yang sama, serta bertujuan untuk meraih kekuatan politik dan merebut kedudukan politik untuk mendapatkan kekuasaan di

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan suatu usaha untuk menjelaskan sesuatu konsep yang masih berbentuk konstruk menjadi kata-kata yang bisa menggambarkan bentuk dan perilaku dari fokus penelitian yang dapat diuji kebenarannya oleh orang lain. Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penyusunan Skripsi ini.

1. Faktor Pertimbangan Perubahan Pola Suksesi Kepemimpinan
 - a. Menyederhanakan mekanisme pemilihan dan mengurangi gejala dan potensi konflik.
 - b. Menghindari Perpecahan dan *Money Politic*.
2. Dampak Perubahan Pola Suksesi Kepemimpinan.
 - a. Dampak Positif, Meminimalisir perpecahan atau dualisme dalam internal partai.
 - b. Dampak Negatif, Terkesan tidak demokratis dan mengurangi partisipasi kader dalam menentukan pemimpin partai.

I. Metode Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁶ Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara

²⁶Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung. Hal 4

holistik, serta tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan

b. Jenis Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan (1) data Primer yaitu semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan. (2) data Sekunder yaitu semua informasi yang kita peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dokumen partai, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

Wawancara (*Interview*)

Pada teknik ini, peneliti mengadakan tatap muka dan berinteraksi Tanya jawab langsung dengan pihak responden atau subyek untuk memperoleh data. Wawancara dalam penelitian ini khususnya dalam taraf pemulaan, biasanya tidak berstruktur. Tujuan ialah memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain.

²⁷Rahmawati, Dian Eka. 2011. *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta.

Pada mulanya belum dapat dipersiapkan sejumlah pertanyaan yang spesifik karena belum dapat diramalkan keterangan apa yang akan diberikan oleh responden, belum diketahui secara jelas kearah mana pembicaraan yang berkembang, karena itu wawancara tidak berstruktur, artinya responden dapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan, peneliti dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur yang disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh informan.²⁹

Dengan demikian, maka cirri-ciri pokok dari wawancara, adalah sebagai berikut:

- a) Di dalam wawancara diperlukan perilaku yang senantiasa saling menyesuaikan diri, terutama dari pewawancara.
- b) Wawancara sangat berguna untuk memperoleh data perihal sikap, perasaan, pikiran, kepercayaan, dan hal-hal yang mengingat faktor-faktor tersebut.
- c) Wawancara memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mempergunakan perbagai tipe pertanyaan.
- d) Perluasan ruang lingkup, dimungkinkan didalam wawancara.
- e) Di dalam wawancara seringkali tidak ada waktu untuk mempergunakan dan memformulasikan bahasa yang baik.
- f) Dalam wawancara, maka yang diwawancarai mempunyai kedudukan yang terbuka maupun peranan yang terbuka.

²⁹Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-

g) Kadang-kadang pewawancara harus dilengkapi dengan data, apabila yang diwawacarai pada saat tertentu menghendaki data tersebut.

Menurut Stewart dan Cash, wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi.³⁰ Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*depth interview*) untuk mendapatkan data yang sebenarnya dengan unit analisa yaitu pengurus partai baik di DPW maupun di DPP PAN.

Berikut beberapa nama narasumber yang sudah di wawancara oleh penulis :

Tabel 1.2 Daftar Narasumber Penelitian

NO	Nama	Waktu Wawancara	Keterangan	Informan
1.	Eddy Soeparno	28 Januari 2017	Sekretaris Jenderal PAN	Utama
2.	Ashabul Kahfi	10 Februari 2017	Ketua DPW PAN	Utama
3.	Usman Lonta	8 Februari 2017	Wakil Ketua DPW PAN	Utama
4.	Nuskanita Maruddani	8 Februari 2017	Wakil Ketua DPW PAN	Utama

i. Dokumentasi

Menurut Herdiansyah, studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.³¹ Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil data statistik, maupun dokumen-dokumen yang ada di Sekretariat tim sukses.

³⁰Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu (1) Reduksi Data (*reduction*), (2) Sajian Data (*display*) dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing*).³² Reduksi data yang dimaksud adalah data hasil wawancara serta dokumentasi yang diperoleh yang *Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman*. Padang. Universitas Negeri Padang kemudian diidentifikasi agar lebih mudah dan focus.

Setelah dilakukannya identifikasi pada data kemudian data dideskripsikan dalam bentuk sajian yang diperkuat dengan analisis untuk membuat kesimpulan. Sehingga proses analisis dimulai dengan melakukan strukturisasi data primer dari hasil wawancara dan observasi untuk dianalisis, kemudian memilah data sekunder yang terkait yang terkait dengan kajian permasalahan seperti bagaimana diskursus demokrasi di dalam tubuh Partai Amanat Nasional dan bagaimana implementasinya. Untuk analisis didukung juga dengan pemberitaan media cetak lainnya yang berupa jurnal dan buku referensi. Dari hasil analisis kedua jenis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan sesuai tujuan dalam peneliti.